



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM  
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat.

KETIGA : Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah program strategis milik klien pengawasan meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berpotensi untuk dilakukan pengawasan.

KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Audit Plan*) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA  
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT TAHUN 2022

I. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), meliputi:

- a. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*);
- b. pelaksanaan asurans (*assurance*) yang fokus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi;
- c. pemberian konsultasi (*consulting*) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- e. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM).

III. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;

- d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

#### IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup audit, reuiu, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya atas:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. pengelolaan sumber daya daerah;
- d. pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
- g. pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara;
- h. penyelenggaraan SPIP; dan
- i. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

#### V. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), dengan fokus meliputi:

##### A. Kegiatan Audit

1. program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
2. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
3. penjatuhan sanksi administratif oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat Gubernur;
4. penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
5. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan bahwa optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak telah dilaksanakan; dan
6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. Kegiatan Reviu

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
2. dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

1. penilaian maturitas SPIP;
2. penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP;
4. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan
7. pelaksanaan survei penilaian integritas.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1. pemeriksaan akhir jabatan;
2. pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
3. pengendalian gratifikasi;
4. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
5. pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
6. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
7. pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. pengembangan *Audit Management System* (AMS) dan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM); dan
10. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.

E. Kegiatan Konsultasi

1. sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
2. sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah;
3. pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
5. pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

F. Kegiatan Dukungan Pengawasan

1. pendidikan dan pelatihan; dan
2. pelatihan kantor sendiri.

## VI. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Gubernur dan pimpinan klien pengawasan. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Klien pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA  
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

SEMESTA PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Biro Pemerintahan
3	Biro Hukum
4	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
5	Biro Kesejahteraan Sosial
6	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
7	Biro Kepala Daerah
8	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
9	Biro Kerja Sama Daerah
10	Biro Perekonomian dan Keuangan
11	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
12	Dinas Bina Marga
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
	D. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	F. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
13	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
14	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
	D. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga



15	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E.	Program Peningkatan Pencahayaan Kota
16	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E.	Program Peningkatan Pencahayaan Kota
17	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
	B.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E.	Program Peningkatan Pencahayaan Kota
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	E.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
19	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
20	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
21	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
22		Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
23		Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	D.	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
24		Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu
	A.	Program Penataan Kawasan Permukiman
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25		Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan
26		Unit Pengelola Rumah Susun Marunda
27		Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru
28		Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat
29		Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
30		Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek
31		Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang
32		Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari
33		Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang
34		Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok
35		Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum
36		Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat
37		Unit Pengelola Rumah Susun Semper
38		Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera
39		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
40		Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
41		Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara
42		Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
43		Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
43		Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
45		Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
46		Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
47		Dinas Sumber Daya Air
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	E.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
	F.	Program Konservasi Air Tanah dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
48	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
49	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	E.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
50	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
51	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
52	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	D.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
53	Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Pengendalian Banjir
	B.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	C.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Sumber Daya Air
	F.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
54	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	E.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan
55		Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
56		Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
57		Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
58		Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
59		Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

60	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Pengendalian Banjir
	B.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
	C.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	F.	Program Pengendali Banjir dan Abrasi
61	Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	
	A.	Program Penataan Ruang
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
62	Dinas Perhubungan	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	C.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	D.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
63	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
64	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
65	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
66	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
67	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
68	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan

	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
69	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
70	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
71	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
72	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
73	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
74	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
75	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
76	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
77	Unit Pengelola Perparkiran	
	A.	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
78	Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
79	Unit Pengelola Angkutan Perairan	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	B.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
80	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
81	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	
	A.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
82	Dinas Kesehatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
	F.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
83	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
84	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	
	A.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	B.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
85	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
86	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
87	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
88	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

89	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
90	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
91	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
92	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
93	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
94	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
95	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
96	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
97	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan



	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
98	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
99	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
	F.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
100	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
101	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
102	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
103	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
104	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
105	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

106	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
	F.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
107	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
108	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
109	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	B.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
110	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	B.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
111	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
112	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
113	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

114	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
115	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
	F.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
116	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
117	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	B.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
118	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
119	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
120	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
121	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

122	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
123	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
124	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
125	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
126	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
127	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
128	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
129	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

130	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
131	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
132	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
133	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	B.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
134	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
135	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
136	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
137	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
138	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan

	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
139	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
140	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
141	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
142	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
143	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
144	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
145	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
146	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
147	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
148	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
149	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
150	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
151	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
152	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
153	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
154	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
155	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

156	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
157	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
158	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
159	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
160	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
161	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
162	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
163	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM



164	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
165	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
166	Laboratorium Kesehatan Daerah	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
167	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	D.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	E.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
168	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
	C.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
	D.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
	E.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
169	Dinas Pendidikan	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	D.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	E.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	F.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	G.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	H.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
170	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan

171	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
172	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
173	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
174	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
175	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
176	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
177	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
178	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
179		Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
180		Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep. Seribu
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	C.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
181		Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
182		Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
183		Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
184		Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kep.Seribu
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
185		Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
186		Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
187		Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
	A.	Program Wajib Belajar 12 Tahun
	B.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

188	Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
189	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
190	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
191	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
192	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	
	A.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	B.	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
193	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
194	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	
195	Dinas Pemuda dan Olahraga	
196	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	
197	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara	
198	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	
199	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	
200	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	
201	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	
202	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	
203	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	
204	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	
205	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	
206	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	
207	Dinas Sosial	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Pemberdayaan Sosial
	D.	Program Penanganan Fakir Miskin
	E.	Program Perlindungan Sosial
	F.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	G.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
208	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Perlindungan Sosial

	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
209	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Perlindungan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
210	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Perlindungan Sosial
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
211	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Perlindungan Sosial
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
212	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Perlindungan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
213	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
214	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
215	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
216	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
217	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial

218	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
219	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
220	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
221	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
222	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
223	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
224	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
225	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
226	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
227	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial

228	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
229	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
230	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
231	Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
232	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
233	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	
	A.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
234	Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	
	A.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
235	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
236	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	
	A.	Program Rehabilitasi Sosial
	B.	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
237	Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial	
	A.	Program Penanganan Fakir Miskin
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
238	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	A.	Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
	B.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

	C.	Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
239	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
240	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
241	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
	B.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
242	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
	B.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
243	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
244	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
245	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	A.	Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
246	Satuan Polisi Pamong Praja	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial



	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
247	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
248	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
249	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
250	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
251	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
252	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD SATPOL PP
253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	A.	Program Pengelolaan Risiko Bencana
	B.	Program Penanggulangan Bencana
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
254	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	
	A.	Program Pengelolaan Risiko Bencana
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
255	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	A.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	B.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	C.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	F.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
256	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
257	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
258	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
259	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
260		Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
261		Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Kab. Adm - Kep. Seribu
	A.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	C.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
262		Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
263		Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
	A.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	B.	Program Pemberdayaan Masyarakat
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	E.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
264		Pusat Data dan Informasi Keluarga
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	C.	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
265		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
266		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
267		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara
268		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
269		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
270		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
271		Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten - Kep. Seribu
272		Unit Pengelola Metrologi

273	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
274	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	
275	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	
276	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	
277	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
278	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
279	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
280	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
281	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
282	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
283	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
284	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
285		Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan
	A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
286		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan
	F.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
287		Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
288		Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
289		Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
290		Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
291		Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

292	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	E.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan
	F.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
293	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
294	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	
	A.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan
295	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	
	A.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan
	D.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan
296	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	B.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
297	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	
	A.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian
298	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	
	A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
	D.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
299	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	
300	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
301	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
302	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten	
303	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	
304	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
305	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	
306	Pusat Data dan Informasi Keuangan	
307	Unit Pengelola Standar Harga	
308	Badan Pendapatan Daerah	
309	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	
310	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten	

311	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
312	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
313	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
314	Badan Pengelolaan Aset Daerah
315	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
316	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
317	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
318	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
319	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
320	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten - Kep. Seribu
321	Pusat Penyimpanan Barang Daerah
322	Inspektorat
323	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
324	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
325	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
326	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
327	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
328	Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten - Kep. Seribu
329	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
330	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
331	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara
332	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
333	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
334	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
335	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
336	Dinas Lingkungan Hidup
	A. Program Pengelolaan Persampahan
	B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
337	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A. Program Pengelolaan Persampahan
	B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
338	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
	A. Program Pengelolaan Persampahan
	B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
339	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
	A. Program Pengelolaan Persampahan
	B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

340	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pengelolaan Persampahan
	B.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
341	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pengelolaan Persampahan
	B.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
342	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	A.	Program Pengelolaan Persampahan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
343	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	
	A.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
344	Unit Pengelola Sampah Terpadu	
	A.	Program Pengelolaan Persampahan
	B.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
345	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air	
	A.	Program Pengelolaan Persampahan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
346	Dinas Kebudayaan	
347	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
348	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	
349	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	
350	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
351	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	
352	Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten - Kep. Seribu	
353	Unit Pengelola Museum Kesenjarian Jakarta	
354	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	
355	Unit Pengelola Museum Seni	
356	Pusat Konservasi Cagar Budaya	
357	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	
358	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	
359	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	
360	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	
361	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
362	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat	
363	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara	
364	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat	
365	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur	
366	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	



367	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten - Kep. Seribu	
368	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	
369	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan	
370	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	
371	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
372	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat	
373	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara	
374	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat	
375	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	
376	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur	
377	Badan Kepegawaian Daerah	
378	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	
379	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	
380	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	
381	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	
382	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	
383	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Dki Jakarta	
384	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan Di Bidang Ketenagakerjaan
	D.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	E.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	F.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
385	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	E.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
	F.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
386	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	E.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
387	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja

	E.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
	F.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
388		Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	E.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
	F.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
	G.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
389		Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Penciptaan Hubungan Industrial Yang Harmonis
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	E.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
390		Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kabupaten - Kep. Seribu
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
	D.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
	E.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
391		Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
392		Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
393		Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
394		Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
395		Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja

396	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
397	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
398	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	A.	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan Di Bidang Ketenagakerjaan
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
399	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	
	A.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
400	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
	E.	Program Pengembangan Data Statistik Sektor
	F.	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
401	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
402	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara	
	A.	
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
403	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika

404	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
405	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
406	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten - Kep.Seribu	
	A.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	B.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
	D.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
407	Unit Pengelola Jakarta Smart City	
408	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
409	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
410	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	
411	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat	
412	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
413	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	
414	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
415	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	
416	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	
417	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat	
418	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	
419	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	
420	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Kep. Seribu	
421	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	
422	Kota Administrasi Jakarta Pusat	
423	Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	
424	Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat	
425	Kelurahan Bendungan Hilir Kota Administrasi Jakarta Pusat	
426	Kelurahan Karet Tengsin Kota Administrasi Jakarta Pusat	
427	Kelurahan Petamburan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
428	Kelurahan Kebon Melati Kota Administrasi Jakarta Pusat	
429	Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat	
430	Kelurahan Kampung Bali Kota Administrasi Jakarta Pusat	
431	Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat	

432	Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
433	Kelurahan Pegangsaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
434	Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat
435	Kelurahan Gondangdia Kota Administrasi Jakarta Pusat
436	Kelurahan Kebon Sirih Kota Administrasi Jakarta Pusat
437	Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat
438	Kelurahan Kenari Kota Administrasi Jakarta Pusat
439	Kelurahan Paseban Kota Administrasi Jakarta Pusat
440	Kelurahan Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat
441	Kelurahan Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat
442	Kelurahan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat
443	Kelurahan Bungur Kota Administrasi Jakarta Pusat
444	Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat
445	Kelurahan Rawasari Kota Administrasi Jakarta Pusat
446	Kelurahan Cempaka Putih Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat
447	Kelurahan Cempaka Putih Barat Kota Administrasi Jakarta Pusat
448	Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
449	Kelurahan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
450	Kelurahan Kampung Rawa Kota Administrasi Jakarta Pusat
451	Kelurahan Galur Kota Administrasi Jakarta Pusat
452	Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat
453	Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
454	Kelurahan Harapan Mulia Kota Administrasi Jakarta Pusat
455	Kelurahan Cempaka Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
456	Kelurahan Sumur Batu Kota Administrasi Jakarta Pusat
457	Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat
458	Kelurahan Kebon Kosong Kota Administrasi Jakarta Pusat
459	Kelurahan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
460	Kelurahan Utan Panjang Kota Administrasi Jakarta Pusat
461	Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
462	Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
463	Kelurahan Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
464	Kelurahan Karang Anyar Kota Administrasi Jakarta Pusat
465	Kelurahan Kartini Kota Administrasi Jakarta Pusat
466	Kelurahan Gunung Sahari Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat
467	Kelurahan Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
468	Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
469	Kelurahan Cideng Kota Administrasi Jakarta Pusat
470	Kelurahan Petojo Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
471	Kelurahan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
472	Kelurahan Kebon Kelapa Kota Administrasi Jakarta Pusat
473	Kelurahan Petojo Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat
474	Kelurahan Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat
475	Kota Administrasi Jakarta Utara
476	Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
477	Kelurahan Kamal Muara Kota Administrasi Jakarta Utara
478	Kelurahan Kapuk Muara Kota Administrasi Jakarta Utara
479	Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara

480	Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
481	Kelurahan Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara
482	Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
483	Kelurahan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara
484	Kelurahan Pademangan Barat Kota Administrasi Jakarta Utara
485	Kelurahan Pademangan Timur Kota Administrasi Jakarta Utara
486	Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
487	Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara
488	Kelurahan Sunter Agung Kota Administrasi Jakarta Utara
489	Kelurahan Papanggo Kota Administrasi Jakarta Utara
490	Kelurahan Warakas Kota Administrasi Jakarta Utara
491	Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara
492	Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara
493	Kelurahan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
494	Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
495	Kelurahan Tugu Utara Kota Administrasi Jakarta Utara
496	Kelurahan Tugu Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara
497	Kelurahan Rawa Badak Utara Kota Administrasi Jakarta Utara
498	Kelurahan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
499	Kelurahan Rawa Badak Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara
500	Kelurahan Lagoa Kota Administrasi Jakarta Utara
501	Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
502	Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara
503	Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara
504	Kelurahan Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara
505	Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
506	Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara
507	Kelurahan Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara
508	Kelurahan Marunda Kota Administrasi Jakarta Utara
509	Kelurahan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
510	Kelurahan Semper Timur Kota Administrasi Jakarta Utara
511	Kelurahan Semper Barat Kota Administrasi Jakarta Utara
512	Kelurahan Kalibaru Kota Administrasi Jakarta Utara
513	Kota Administrasi Jakarta Barat
514	Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
515	Kelurahan Sukabumi Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
516	Kelurahan Sukabumi Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
517	Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat
518	Kelurahan Duri Kepa Kota Administrasi Jakarta Barat
519	Kelurahan Kedoya Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
520	Kelurahan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
521	Kelurahan Kedoya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
522	Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
523	Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
524	Kelurahan Meruya Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
525	Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
526	Kelurahan Srengseng Kota Administrasi Jakarta Barat
527	Kelurahan Joglo Kota Administrasi Jakarta Barat

528	Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
529	Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
530	Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat
531	Kelurahan Cengkareng Timur Kota Administrasi Jakarta Barat
532	Kelurahan Kapuk Kota Administrasi Jakarta Barat
533	Kelurahan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat
534	Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat
535	Kelurahan Kedaung Kali Angke Kota Administrasi Jakarta Barat
536	Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
537	Kelurahan Kamal Kota Administrasi Jakarta Barat
538	Kelurahan Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat
539	Kelurahan Pegadungan Kota Administrasi Jakarta Barat
540	Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
541	Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat
542	Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
543	Kelurahan Tomang Kota Administrasi Jakarta Barat
544	Kelurahan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
545	Kelurahan Grogol Kota Administrasi Jakarta Barat
546	Kelurahan Jelambar Kota Administrasi Jakarta Barat
547	Kelurahan Jelambar Baru Kota Administrasi Jakarta Barat
548	Kelurahan Wijaya Kusuma Kota Administrasi Jakarta Barat
549	Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
550	Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
551	Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
552	Kelurahan Kemanggisan Kota Administrasi Jakarta Barat
553	Kelurahan Slipi Kota Administrasi Jakarta Barat
554	Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
555	Kelurahan Jati Pulo Kota Administrasi Jakarta Barat
556	Kelurahan Kota Bambu Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
557	Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
558	Kelurahan Kali Anyar Kota Administrasi Jakarta Barat
559	Kelurahan Duri Utara Kota Administrasi Jakarta Barat
560	Kelurahan Tanah Sereal Kota Administrasi Jakarta Barat
561	Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat
562	Kelurahan Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat
563	Kelurahan Angke Kota Administrasi Jakarta Barat
564	Kelurahan Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat
565	Kelurahan Duri Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
566	Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
567	Kelurahan Pekojan Kota Administrasi Jakarta Barat
568	Kelurahan Roa Malaka Kota Administrasi Jakarta Barat
569	Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat
570	Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat
571	Kelurahan Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat
572	Kelurahan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat
573	Kelurahan Tangki Kota Administrasi Jakarta Barat
574	Kelurahan Mangga Besar Kota Administrasi Jakarta Barat
575	Kelurahan Keagungan Kota Administrasi Jakarta Barat

576	Kelurahan Glodok Kota Administrasi Jakarta Barat
577	Kelurahan Pinangsia Kota Administrasi Jakarta Barat
578	Kota Administrasi Jakarta Selatan
579	Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan
580	Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
581	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
582	Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan
583	Kelurahan Cipulir Kota Administrasi Jakarta Selatan
584	Kelurahan Grogol Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
585	Kelurahan Grogol Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
586	Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
587	Kelurahan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
588	Kelurahan Petukangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
589	Kelurahan Petukangan Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
590	Kelurahan Ulujami Kota Administrasi Jakarta Selatan
591	Kelurahan Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan
592	Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
593	Kelurahan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
594	Kelurahan Jatipadang Kota Administrasi Jakarta Selatan
595	Kelurahan Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
596	Kelurahan Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan
597	Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan
598	Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
599	Kelurahan Pejaten Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan
600	Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
601	Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
602	Kelurahan Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan
603	Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan
604	Kelurahan Lenteng Agung Kota Administrasi Jakarta Selatan
605	Kelurahan Tanjung Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
606	Kelurahan Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan
607	Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
608	Kelurahan Tegal Parang Kota Administrasi Jakarta Selatan
609	Kelurahan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
610	Kelurahan Pela Mampang Kota Administrasi Jakarta Selatan
611	Kelurahan Kuningan Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
612	Kelurahan Bangka Kota Administrasi Jakarta Selatan
613	Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan
614	Kelurahan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan
615	Kelurahan Duren Tiga Kota Administrasi Jakarta Selatan
616	Kelurahan Kalibata Kota Administrasi Jakarta Selatan
617	Kelurahan Rawajati Kota Administrasi Jakarta Selatan
618	Kelurahan Pengadegan Kota Administrasi Jakarta Selatan
619	Kelurahan Cikoko Kota Administrasi Jakarta Selatan
620	Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
621	Kelurahan Gandaria Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
622	Kelurahan Cipete Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
623	Kelurahan Pulo Kota Administrasi Jakarta Selatan



624	Kelurahan Petogogan Kota Administrasi Jakarta Selatan
625	Kelurahan Melawai Kota Administrasi Jakarta Selatan
626	Kelurahan Kramat Pela Kota Administrasi Jakarta Selatan
627	Kelurahan Gunung Kota Administrasi Jakarta Selatan
628	Kelurahan Selong Kota Administrasi Jakarta Selatan
629	Kelurahan Rawa Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
630	Kelurahan Senayan Kota Administrasi Jakarta Selatan
631	Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
632	Kelurahan Karet Semanggi Kota Administrasi Jakarta Selatan
633	Kelurahan Kuningan Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan
634	Kelurahan Karet Kuningan Kota Administrasi Jakarta Selatan
635	Kelurahan Karet Kota Administrasi Jakarta Selatan
636	Kelurahan Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan
637	Kelurahan Pasar Manggis Kota Administrasi Jakarta Selatan
638	Kelurahan Guntur Kota Administrasi Jakarta Selatan
639	Kelurahan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
640	Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
641	Kelurahan Menteng Dalam Kota Administrasi Jakarta Selatan
642	Kelurahan Tebet Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
643	Kelurahan Tebet Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan
644	Kelurahan Kebon Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
645	Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan
646	Kelurahan Manggarai Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
647	Kelurahan Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan
648	Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
649	Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan
650	Kelurahan Pondok Labu Kota Administrasi Jakarta Selatan
651	Kelurahan Cilandak Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
652	Kelurahan Gandaria Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
653	Kelurahan Cipete Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
654	Kota Administrasi Jakarta Timur
655	Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur
656	Kelurahan Pekayon Kota Administrasi Jakarta Timur
657	Kelurahan Kalisari Kota Administrasi Jakarta Timur
658	Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur
659	Kelurahan Cijantung Kota Administrasi Jakarta Timur
660	Kelurahan Gedong Kota Administrasi Jakarta Timur
661	Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
662	Kelurahan Cibubur Kota Administrasi Jakarta Timur
663	Kelurahan Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur
664	Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur
665	Kelurahan Susukan Kota Administrasi Jakarta Timur
666	Kelurahan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
667	Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
668	Kelurahan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
669	Kelurahan Lubang Buaya Kota Administrasi Jakarta Timur
670	Kelurahan Ceger Kota Administrasi Jakarta Timur
671	Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur

672	Kelurahan Setu Kota Administrasi Jakarta Timur
673	Kelurahan Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur
674	Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur
675	Kelurahan Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur
676	Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
677	Kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur
678	Kelurahan Kampung Dukuh Kota Administrasi Jakarta Timur
679	Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
680	Kelurahan Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur
681	Kelurahan Bale Kambang Kota Administrasi Jakarta Timur
682	Kelurahan Cililitan Kota Administrasi Jakarta Timur
683	Kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur
684	Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
685	Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur
686	Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kota Administrasi Jakarta Timur
687	Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur
688	Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
689	Kelurahan Pinang Ranti Kota Administrasi Jakarta Timur
690	Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
691	Kelurahan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur
692	Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur
693	Kelurahan Bali Mester Kota Administrasi Jakarta Timur
694	Kelurahan Rawa Bunga Kota Administrasi Jakarta Timur
695	Kelurahan Cipinang Cempedak Kota Administrasi Jakarta Timur
696	Kelurahan Cipinang Muara Kota Administrasi Jakarta Timur
697	Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur
698	Kelurahan Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur
699	Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
700	Kelurahan Klender Kota Administrasi Jakarta Timur
701	Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur
702	Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
703	Kelurahan Malaka Sari Kota Administrasi Jakarta Timur
704	Kelurahan Malaka Jaya Kota Administrasi Jakarta Timur
705	Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur
706	Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur
707	Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
708	Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur
709	Kelurahan Utan Kayu Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur
710	Kelurahan Utan Kayu Utara Kota Administrasi Jakarta Timur
711	Kelurahan Kayu Manis Kota Administrasi Jakarta Timur
712	Kelurahan Palmeriam Kota Administrasi Jakarta Timur
713	Kelurahan Kebon Manggis Kota Administrasi Jakarta Timur
714	Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
715	Kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur
716	Kelurahan Cipinang Kota Administrasi Jakarta Timur
717	Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur
718	Kelurahan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
719	Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur

720	Kelurahan Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
721	Kelurahan Kayu Putih Kota Administrasi Jakarta Timur
722	Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
723	Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
724	Kelurahan Rawa Terate Kota Administrasi Jakarta Timur
725	Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur
726	Kelurahan Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur
727	Kelurahan Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur
728	Kelurahan Cakung Timur Kota Administrasi Jakarta Timur
729	Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur
730	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu
731	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu
732	Kelurahan P.Panggang - Kep. Seribu
733	Kelurahan P.Kelapa - Kep. Seribu
734	Kelurahan P.Harapan - Kep. Seribu
735	Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu
736	Kelurahan P.Untung Jawa - Kep. Seribu
737	Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu
738	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR **103 TAHUN 2022**  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2022

I. INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

NO AUDIT	AREA PENGAWASAN (PRANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												Jumlah Personil Utama	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Probity Audit Penyediaan Mobil Pompa pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan															10	40	60,000,000
		1 (Sesuai Jadwal RUP)																
2	Audit atas kegiatan PBJ percepatan penanganan Covid-19 dibawah Asisten Pemerintahan		I	I	I											20	40	120,000,000
3	Audit Penggunaan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Diskominfotik															10	40	60,000,000
4	Audit Kinerja BP BUMD Provinsi DKI Jakarta															25	70	262,500,000
5	Audit Kinerja UP Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta															15	30	67,500,000
6	Audit atas Belanja Daerah pada Disnakertrans Pemprov DKI Jakarta															15	50	112,500,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												SASARAN	RUANG LINGKUP	TUJUAN	Jumlah Utama	Jumlah Personil Dukung	Jumlah Hari	ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
7	Audit atas Belanja Daerah pada Disparekrat Pemprov DKI Jakarta															Belanja Daerah Disparekrat Pemprov DKI Jakarta TA 2021 dan TA 2022.		15	50	112,500,000
8	Probity Audit Kegiatan Revitalisasi Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke (Rehab Pasar Ikan)															Kegiatan Revitalisasi Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke 1. Prose pemilihan penyedia. 2. Pelaksanaan kegiatan.	15	40	90,000,000	
9	Audit Kinerja atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Aset															Sistem Informasi Manajemen Aset yang dibangun oleh BPAD s.d Tahun 2022	15	40	90,000,000	
10	Audit Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Obyek Pajak															PBB-P2 berupa Tanah Kosong s.d dari Obyek Pajak berupa Tanah Kosong Tahun 2022 termasuk piutangnya) dan dalam mendukung upaya optimalisasi Hasil Sensus Pajak Tahun 2021 PAD	15	60	135,000,000	
11	Audit atas Pengelolaan Pajak Air Tanah															Pencanaan/Pencapaian target s.d Pajak Air Tanah Tahun 2020 dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah	15	20	45,000,000	
12	Audit atas Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama Daerah (Biro KSD) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta															Pelaksanaan kerja sama daerah dalam Kerjasama Daerah yang dilakukan melalui Biro Kerja Sama Daerah	8	20	24,000,000	

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												Jumlah Personil Utama	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
13	Audit Kinerja Lapangan atas Peningkatan Ruang Terbuka Hijau															17	40	102,000,000
14	Probit Audit atas Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelempang Jalan di area Trotoar pada Dinas Bina Marga									IV	IV					10	30	45,000,000
15	Probit Audit atas Pembangunan Saringan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup									IV	IV					10	30	45,000,000
16	Audit Penggunaan Pinjaman dalam Rangka Pembiayaan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 atas: 1. Budge dan Instruktur Pengendalian Minum Pada Dinas Sumber Daya Air 2. Program Infrastruktur Transportasi Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta										IV	IV				20	40	120,000,000
17	Audit Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Tahun Anggaran 2021															23	40	138,000,000
18	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022															23	60	207,000,000

Sasaran  
Aset berupa tanah hasil pengadaan RTH yang belum dimanfaatkan

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Latar Belakang  
Pemanfaatan RTH taman masih belum memadai

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

Ruang Lingkup  
Pemanfaatan RTH taman sampai dengan Tahun 2022

Tujuan  
Meyakinkan pelaksanaan pengelolaan RTH taman

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JUMLAH PERSONIL DUKUNGAN	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES						
19	Audit Keabsahan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe D Tahun Anggaran 2022																18	20	54,000,000
	LATAR BELAKANG	1. Belum dilaksanakan pemeriksaan selama 3 tahun. 2. Adanya Fleksibilitas Penggunaan Dana BLUD. 3. Hibah dari Pemerintah, Masyarakat dan Swasta yang diterima RSUD dalam percepatan penanganan Covid-19 belum tertib 4. Penatausahaan dana BLUD belum tertib																	
	TUJUAN	Memberikan keyakinan yang memadai atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe D Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.																	
	RUANG LINGKUP	Penatausahaan Dana BLUD Tahun Anggaran 2022.																	
	SASARAN	1. Pendapatan BLUD 2. Belanja BLUD																	
20	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022																23	72	207,000,000
	LATAR BELAKANG	1. Belum dilaksanakan pemeriksaan selama 3 tahun. 2. Adanya Fleksibilitas Penggunaan Dana BLUD. 3. Hibah dari Pemerintah, Masyarakat dan Swasta yang diterima RSUD dalam percepatan penanganan Covid-19 belum tertib 4. Penatausahaan dana BLUD belum tertib																	
	TUJUAN	Memberikan keyakinan yang memadai atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.																	
	RUANG LINGKUP	Penatausahaan Dana BLUD Tahun Anggaran 2022.																	
	SASARAN	1. Pendapatan BLUD 2. Belanja BLUD																	
21	Probit Audit atas Perencanaan Pembangunan pada 6 Gelanggang Remaja Tahun Anggaran 2022																23	20	69,000,000
	LATAR BELAKANG	1. Pembangunan gelanggang merupakan bagian dari peningkatan kebutuhan fisik bagi masyarakat yang dibatasi oleh jam kerja yang sangat padat. 2. Menambah fasilitas yang ada mulai dari kebutuhan yang berhubungan dengan olahraga sampai dengan kebutuhan yang kurang berhubungan dengan olah raga. 3. Wadah penampung kegiatan olahraga dengan segala fasilitas yang disediakan.																	
	TUJUAN	1. Untuk memberikan keyakinan bahwa rencana Rehab total Pembangunan Gelanggang Remaja telah dididului dengan proses identifikasi kebutuhan ril 2. Menambah fasilitas yang ada mulai dari kebutuhan yang berhubungan dengan olahraga sampai dengan kebutuhan yang kurang berhubungan dengan olah raga. 3. Wadah penampung kegiatan olahraga dengan segala fasilitas yang disediakan.																	
	RUANG LINGKUP	Perencanaan Pembangunan Remaja Tahun Anggaran 2022																	
	SASARAN	1. Perencanaan Rehab total pembangunan Gelanggang Remaja dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan riil 2. Mencegah (early ring system) atau kemungkinan penyimpangan dalam perencanaan Rehab total pembangunan Gelanggang Remaja 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas perencanaan pengadaan barang/jasa																	
22	Post Audit Dana BTT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021																23	42	138,000,000
	LATAR BELAKANG	Jumlah Anggaran BTT yang besar untuk pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan.																	
	TUJUAN	Memberikan keyakinan yang memadai atas Belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran BTT pada Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.																	
	RUANG LINGKUP	Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran BTT Tahun Anggaran 2021																	
	SASARAN	1. Proses Perencanaan 2. Proses Pelaksanaan 3. Proses Pelaporan																	
23	Perhitungan kerugian keuangan daerah																		
	LATAR BELAKANG	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021																	
	TUJUAN	Untuk menindaklanjuti kasus yang dilimpahkan dari APH apakah berindikasi pada kerugian daerah																	
	RUANG LINGKUP	Penyimpangan yang berindikasi pada Kerugian daerah																	
	SASARAN	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan dari APH untuk dilakukan perhitungan kerugian negara																	
24	Monitoring tindak lanjut hasil penangan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi (pelimpahan APH)																5	10	7,500,000
	LATAR BELAKANG	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021																	
	TUJUAN	Untuk meyakinkan bahwa perjanjian kerjasama APH dan APH dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan																	
	RUANG LINGKUP	Laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi																	
	SASARAN	1. Penangan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APH dengan APH 2. Perhitungan kerugian keuangan daerah																	

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JUMLAH PERSONIL DUKUNGAN	JUNJAH HARI	ANGGARAN (Rp)			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
LATAR BELAKANG		TUJUAN												RUANG LINGKUP		SASARAN			
1	Revisi Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 2023																22	20	126,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022		Untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.												Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan Perubahan Informasi dalam Perubahan RUMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.		1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.			
2	Revisi Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023																22	20	126,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022		Untuk meningkatkan kualitas APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.												Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan Perubahan Informasi dalam Perubahan RUMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.		1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.			
3	Revisi Perubahan RKPD Tahun 2022																22	20	126,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022		Untuk meningkatkan kualitas APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.												Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan Perubahan Informasi dalam Perubahan RUMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.		1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.			
4	Revisi Perubahan Rencana 2022																22	20	126,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022		Untuk meningkatkan kualitas APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.												Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan Perubahan Informasi dalam Perubahan RUMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.		1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.			



NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												Jumlah Personil Durungan	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES							
5	Reviu LKIP																20	20	60,000,000	
6	Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah			I														22	40	180,000,000
7	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan																	20	20	60,000,000
8	Reviu Pelayanan atas Perizinan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perdagangan pada Dinas PMPPTSP			I, II, III, IV, V							II							15	30	67,500,000
9	Reviu atas Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA TA.2022												I, II, III, IV, V					7	15	42,750,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	Jumlah Personil Durungan	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)
5	Reviu LKIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kesesuaian data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	1. Menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang diujikan dalam Laporan Kinerja; 2. Menilai keabsahan dan perencanaan strategi; 3. Pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja.	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	20	20	60,000,000
6	Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	1. Memberikan keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan LPPD 2. Memberikan keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah; 3. Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas	1. Kesesuaian materi dan sistematika LPPD; 2. Kelengkapan bukti dukung indikator kinerja kunci (IKK) tataran pengambil kebijakan; 3. Kelengkapan bukti dukung IKK tataran pelaksanaan kebijakan aspek administrasi umum; 4. Kelengkapan bukti dukung IKK tataran pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan; 5. Kelengkapan bukti dukung IKK tataran pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum; 6. Kelengkapan bukti dukung IKK tataran pelaksanaan kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan; 7. Validitas data pada IKK tataran pengambil kebijakan dan IKK tataran pelaksanaan kebijakan.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	8	40	180,000,000
7	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	Mandatori dan Memiliki keterkaitan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang merujuk LKPD dengan predikat WTP	Untuk mengetahui saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan PD/UKPD TA 2022	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan PD/UKPD	20	20	60,000,000
8	Reviu Pelayanan atas Perizinan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perdagangan pada Dinas PMPPTSP	Permendagri tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan bidang tenaga kerja dan bidang perdagangan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	Pelayanan perizinan bidang tenaga kerja dan bidang perdagangan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta	1. Pelayanan perizinan bidang tenaga kerja. 2. Pelayanan perizinan bidang perdagangan.	15	30	67,500,000
9	Reviu atas Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA TA.2022	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revisi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan	Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dan keabsahan dokumen perencanaan dan anggaran	Kesesuaian rumusan Perubahan KUA-PPAS dan RKA Perubahan TA 2022 dengan RKPD, RPJMD dan Renja	Kesesuaian rumusan KUA-PPAS dengan RKPD, RPJMD dan Renja	7	15	42,750,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT TA 2023	2022												JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL		ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES											UTAMA	DUKUNGAN	
10	Revisi atas Rancangan KUA-PPAS / RKA TA 2023																					15	12	15	60,750,000	
11	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprom DKI Jakarta TA 2021	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL																		65		51	497,250,000	
12	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprom DKI Jakarta Semester I TA 2022																					65		20	195,000,000	
13	Revisi atas Pertanggungjawaban Pencapaian dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)																					5		20	15,000,000	
14	Revisi atas Penyusunan HPS																					8		10	12,000,000	
15	Revisi atas SSH, ASB dan HSPK																					7		10	10,500,000	

NO	AREA PENGAWASAN (PEBANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												SASARAN	RUANG LINGKUP	TUJUAN	RUANG LINGKUP	JUMLAH PERSONIL		ANGGARAN (Rp)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					UTAMA	DUKUNGAN		JUMLAH HARI
<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>																					
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) SKPD									I, II, III, IV, V, WTL	I, II, III, IV, V, WTL	I, II, III, IV, V, WTL				Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021 atas hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehingga penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.	Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021 atas hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehingga penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.	22	20	60	378,000,000
2	Pemantauan dan Evaluasi SPBE															1. Perencanaan, yaitu penyusunan perencanaan, mempersiapkan instrumen evaluasi, membentuk tim evaluator, dan melakukan sosialisasi pedoman/pelaksanaan evaluasi SPBE. 2. Pelaksanaan, yaitu melakukan penilaian mandiri (pengumpulan data), penilaian dokumen, penilaian interviu (wawancara), dan/atau penilaian visitasi (observasi lapangan). 3. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian berupa indeks SPBE, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan.	1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; 2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; 3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.	10		20	30,000,000
3	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.															1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	Kelengkapan bukti dukung penilaian mandiri reformasi birokrasi pada perangkat daerah	22	20	40	252,000,000
4	Pemantauan atas Kepatuhan penyampaian LHKPN									I, II, III, IV, V, WTL	I, II, III, IV, V, WTL					LHKPN sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2017	Seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	20		10	30,000,000
5	Pemantauan atas Kepatuhan penyampaian LHKASN															LHKASN sesuai Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015	Seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	20		10	30,000,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT internal pemerintahan.	2022												Jumlah Personil Utama	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES			
6	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan.						I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII							20	40	252,000,000
7	Pemantauan dan Evaluasi atas Pemanfaatan Sistem e-Order pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.					III								7	20	21,000,000
8	Pendampingan atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021					III								15	10	22,500,000
9	Pendampingan/Pemantauan atas Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Anggaran yang Bersumber dari Pinjaman Daerah Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Tahun 2022									IV				20	120	360,000,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT yang berbasis gender (responsive gender))	2022												Jumlah Personil Utama	Jumlah Personil Dukung	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)								
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES												
10	Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)													V						5		20	15,000,000		
11	CETAK GOL		VI																			5	20	15,000,000	
12	Pelaksanaan survei penilaian Integritas																					5	10	7,500,000	
13	Penilaian Indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCP Tahun Anggaran 2022																						5	20	15,000,000

NO	AREA PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH/UNIT	2022												Jumlah Personil Utama	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
<b>KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA</b>																		
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022	I, II, III, IV, V														15	20	-
2	Pamjab	I, II, III, IV, V, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
3	Pemeriksaan/Pengawasan Khusus atas Perintah Pimpinan	I, II, III, IV, V, VI, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
4	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	I, II, III, IV, V, VI, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
5	Pendampingan/ Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/ SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	I, II, III, IV, V, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
6	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I, II, III, IV, V, WIL														22	20	-
7	Pemantauan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP dan BPK-RI	I, II, III, IV, V, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
8	Operasionalisasi satu bersih pungutan liar															10	Sesuai kebutuhan	30,000,000
9	Pengawasan MCP : 1) Area Intervensi Manajemen ASN 2) Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran - Sub Indikator Pengawasan Revu Dokumen Perencanaan 3) Area Intervensi Pengawasan	I, II, III, IV, V, WIL														Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
10	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghapusan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP	I, II, III, IV, V, WIL														15	2/ bidang & wilayah	
11	Penanganan Pengaduan Masyarakat/ Kasus dan e-dumas															Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL		ANGGARAN (Rp)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			UTAMA	DUKUNGAN		JUMLAH HARI
<b>KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN</b>																			
1	Penilaian Mandiri Kapabilitas APP					VII									Penilaian atas dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan	Perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan area of improvement	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
2	Quality Assurance atas Penilaian Maturitas sistem pengendalian Internal pemerintah.											I, II, III, IV, V, VI, VII, WIL			Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terdiri dari penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan	Komponen penilaian maturitas SPIP yang terdiri dari penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
3	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko											I, II, III, IV, V, VI, VII, WIL			Proses dan hasil penerapan manajemen risiko	Penilaian dan penanganan risiko	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi											VII			Seluruh ASN Inspektorat	Kompetensi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
7	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor											VII			Seluruh ASN Inspektorat	Kompetensi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD											VII			Seluruh ASN Inspektorat	Kompetensi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
9	Sertifikasi Profesi Pengawasan											VII			Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu	Kompetensi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
10	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan											VII			Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu	Kompetensi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	

## Keterangan :

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- VI Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- VII Sekretariat







NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD							I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							2	60	
2	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.				I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										2	40	
3	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.															2	40	
6	Penilaian indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCF Tahun Anggaran 2022								I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL						1	20	
7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP dan BPK-RI		I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL											17	20	

Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021 atas hasil dari kegiatan/ program yang telah dicapai sebagai tambahan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran

KSD Nomor 39 dan Permenpan 12/2015

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

kelempakan bukti dukung penilaian mandiri reformasi birokrasi pada perangkat daerah

Menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai Penjamin Kualitas tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah

1. Perencanaan dan penganggaran daerah

2. Pengadaan barang dan jasa

3. Pelayanan terpadu satu pintu pemerintah

4. Aparat/pengawas intern

5. Manajemen aparatur sipil negara

6. Manajemen pajak daerah

7. Manajemen aset daerah

Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

a. Lingkup pengendalian;

b. Penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi; dan

e. Pemantauan pengendalian intern.

Ketercapaian waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Perencanaan dan penganggaran

2. Pengadaan barang dan jasa

3. Pelayanan terpadu satu pintu pemerintah

4. Aparat/pengawas intern

5. Manajemen aparatur sipil negara

6. Manajemen pajak daerah

7. Manajemen aset daerah

TLHP, BPK dan APUP yang belum ditindaklanjuti s.d Tahun 2022 oleh PD mitra kerja Itan

Mengetahui progres penyelesaian TLHP BPK RI Peringkat Provinsi DKI Jakarta dan APUP oleh SKPD

Perang 252 Tahun 2016 SOTK Inopektor Pasal 3 ayat 2 huruf m : koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan /penguasaan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya

1. II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

I, II, III, IV, V, WIL

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT MANDIRI/KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022																15	20	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD
2	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)																3		Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3	Pendampingan/Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta																		Penetapan Siperisasi oleh Perangkat Daerah
4	Pemantauan dan Evaluasi atas Penerimaan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Pengoptimalan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP																2	20	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD
5	Rakorwas UPP Provinsi DKI Jakarta																	10	Meyakinkan pelayanan publik telah beres dari pungutan liar
6	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022																15	20	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD
7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP dan BPK-RI																17	20	Progress penyelesaian TLHP BPK RI Perwalian Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (UKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2021 dan tahun sebelumnya (2004 - 2021) dan TLHP APP oleh SKPD
8	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus dan e-dumas																		Meyakinkan adanya penyimpanan atas Pengelolaan Barang dan Jasa/Pembangunan dan pemeliharaan jalan/Pengelolaan sumber daya air/Pengelolaan Perijinan/Pengelolaan dana BOS BOP/Pengelolaan bansos dan subsidi/Diisipin pegawai
9	Pamjab																		Pemisahan batas dan tanggung jawab Barang dan Jasa serta Aset pada SKPD antara Kepala SKPD/UKPD (pejabat lama dengan pejabat baru)
10	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		Pengangkat daerah/unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2022**

**III. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA UTARA**

NO AUDIT	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Post Audit Dana BT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	V WIL	V WIL													7	40	42,000,000
2	Audit Kepatuhan atas pengelolaan Taman Pemakaman Umum		JU	JU												17	30	76,500,000
3	Audit Penyediaan Barang/Jasa Pada Suku Dinas Peninggalan Kebakaran dan Penyelamatan			JU	JU											10	30	45,000,000
4	Audit Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Tahun Anggaran 2021			V, WIL	V, WIL											7	40	42,000,000
5	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022															19	60	171,000,000
6	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022															13	60	117,000,000
7	Audit Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)															6	60	54,000,000
8	Audit Kinerja Lanjutan atas Peningkatan Ruang Terbuka Hijau															10	40	60,000,000

NO REVIU	AREA PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH/UNIT	2022												SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	Revisi Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 2023																1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Penyusunan rancangan substatansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	3	20	
2	Revisi Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023																1. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 2. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.	3	20	
3	Revisi Perubahan RPKD Tahun 2022																1. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 2. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.	3	20	
4	Revisi Perubahan Renja 2022																1. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 2. Melakukan pengujian atas: 1. Kesesuaian informasi dengan RPKD Perubahan RPJMD; 2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.	3	20	

NO	AREA PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH/UNIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI	2022												Jumlah Personil	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD							I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL					3	60	
2	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.				I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL									3	40	

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)	2022												LATAH BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	Pelaksanaan verifikasi Laporan Herta Keayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I, II, III, IV, V, WIL												1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan bagian dari asistensi pembangunan	Memastikan kelengkapan data pada SHacka melalui sistem Siharaka	2021 Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2			
2	Pendampingan/Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/SRP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	I, II, III, IV, V, WIL												PP No 60 Tahun 2008 dan Pergub 122 tahun 2020	Meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP	Penerapan Siperiasi oleh Perangkat Daerah	Penilaian Risiko dan Penanganan Risiko Perangkat Daerah	2		
3	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghapusan Rencanaku Minum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP	I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL		I, II, III, IV, V, WIL		Membrikan keyakinan terbatas atas realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD setiap triwulan	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD	20				
4	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022	JU												Untuk mengetahui saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan realisasi anggaran dan persediaan	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD TA 2022	20				
5	Pamjab	I, II, III, IV, V, WIL												Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Memilih batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD lama dengan yang baru	Pemisahan batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD pejabat lama dengan pejabat baru)	Selesai kebutuhan	Selesai kebutuhan		
6	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus dan e-dumas	JU												Pengaduan masyarakat/perintah Gubernur dan/atau Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah	Untuk menindaklanjuti adanya Laporan/Pengaduan masyarakat/Perintah dan/atau Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah dalam membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Meyakinkan adanya penyimpanan atas Pengelolaan Barang dan Jasa/Pembangunan dan pemeliharaan Jalan/Pengelolaan sumber daya air/Pengelolaan Perijinan/Pengelolaan dana BOS BOP/Pengelolaan busaos dan subsidi/Disiplin pegawai	10		Selesai Kebutuhan	
7	Operasionalisasi sapu bersih punggahan liar	JU												Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021	Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan punggahan liar	Pelayanan publik pada UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Selesai kebutuhan	Selesai kebutuhan	

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2022**

**IV. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA BARAT**

NO AUDIT	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												ANGGARAN (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
25	Post Audit Dana BTT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	V, WIL	V, WIL													8	40	48,000,000
1	Audit atas Pengelolaan Aset dan Belanja Daerah pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat			JB												9	20	27,000,000
2	Post Audit Dana BTT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	V, WIL	V, WIL													9	40	54,000,000
3	Audit Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Tahun Anggaran 2021				V, WIL	V, WIL										10	40	60,000,000
4	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022				V, WIL	V, WIL	V, WIL	V, WIL								8	60	72,000,000
5	Audit Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)							III, WIL	III, WIL	III, WIL						15	60	135,000,000
6	Audit Kinerja Lanjutan atas Peningkatan Ruang Terbuka Hijau								IV, WIL	IV, WIL						6	40	36,000,000
7	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022										V, WIL	V, WIL	V, WIL			10	60	90,000,000



NO REVIU	AREA PENGAWASAN (PELANGKAT DAERAH/ UNIT)	2022												Jumlah Personil	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
1	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2021	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													3	51	Laporan Keuangan yang disajikan oleh SKPD/UKPD (sampling)
2	Revisi Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 2023	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													2	20	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3	Revisi Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													2	20	1. Melaksanakan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam RKKPD dengan Perubahan informasi dalam RKKPD; Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 2. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam RKKPD dengan Perubahan informasi dalam RKKPD; Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 3. Indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
4	Revisi Perubahan RKKPD Tahun 2022	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													2	20	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
5	Revisi Perubahan Rencana	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													2	20	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
6	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2022	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL													3	20	Laporan Keuangan yang disajikan oleh SKPD/UKPD (sampling)

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI)	2022												JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN																			
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD											I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							Laporan Pertanggungjawaban atas hasil dari kegiatan/Program yang telah dicapai sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas dan kualitas terukur.	2	60			
2	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.											I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran	2	40			
3	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.											I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai Peringkat Daerah	2	40			
4	Penilaian Indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCP Tahun Anggaran 2022											I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							Untuk meyakinkan pencapaian target Rencana Aksi Program, koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgati) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	1	20			

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022	JB														15	20	
2	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP	I, II, III, IV, V, WIL														2	20	
3	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I, II, III, IV, V, WIL														3		
4	Pendampingan/Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/SIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta															2		
5	Rakorwus UPP Provindat DKI Jakarta															3	10	
6	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar															Sesuai kebutuhan		
7	Pamjab															Sesuai kebutuhan		
8	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus dan e-dumas															Sesuai Kebutuhan		
9	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															Sesuai kebutuhan		

LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN
Mandatori dan Memiliki keterkaitan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu meraih LKPD dengan predikat WTP	Untuk mengetahui saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD TA 2022	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD
Mandatori dari Presiden melalui BPKP	Memberikan keyakinan terbatas atas realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa	Realisasi penyerapan anggaran belanja barang/jasa dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD setiap triwulan	Realisasi penyerapan anggaran belanja barang/jasa dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan bagian dari asistensi pembangunan	memastikan kelengkapan data pada SIHarka	Penyampailan LHKASN Tahun 2021 melalui sistem SHarka	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
PP No 60 Tahun 2008 dan Pergub 122 tahun 2020	Meningkatkan maturitas penyelenggaraan SIP	Penerapan Siperisai oleh Perangkat Daerah	Penilaian Risiko dan Pemanangan Risiko Perangkat Daerah
1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021	Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pungli	Pelayanan publik	Meyakinkan pelayanan publik telah bersih dari pungutan liar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021	Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pungli	Pelayanan publik pada UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat
Pengukuhan, Pemindahan dan Pembertitipan dalam dan luar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Menilai batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD lama dengan yang baru	Kepengawasan, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset pada SKPD antara Kepala SKPD/UKPD (pejabat yang mengalami pergantian lama dengan pejabat baru)	Pemindahan batas dan tanggung jawab SKPD/UKPD (pejabat yang mengalami pergantian lama dengan pejabat baru)
Pengaduan masyarakat/Perintah Gubernur dan/atau Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah	Untuk menindaklanjuti adanya Laporan/Pengaduan Masyarakat/Perintah Gubernur/Perintah Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah dalam membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Penyimpangan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau merugikan keuangan daerah	Meyakinkan adanya penyimpangan atas Daerah/Pengadaan Barang dan Jasa/Penggunaan dan pemeliharaan Jalan/Pengelolaan sumber daya air/Pengelolaan Perijinan/Pengelolaan dana BOS BOP/Pengelolaan bansos dan subsidi/Disiplin pegawai
Keputusan Inspektur No 4 Tahun 2021 tentang SOP Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peleaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2022**

**V. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN**

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)	2022												SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
1	Post Audit Dana BTT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	V WIL	V WIL														20	40	120,000,000
2	Audit atas Pengelolaan Aset dan Belanja Daerah pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan				JS												20	30	90,000,000
3	Audit Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Tahun Anggaran 2021				V, WIL												20	40	120,000,000
4	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022					V, WIL	V, WIL	V, WIL	V, WIL								20	60	180,000,000
5	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022									V, WIL	V, WIL	V, WIL	V, WIL				10	60	90,000,000
6	Audit Kinerja atas Optimalisasi Pemenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)										III, WIL	III, WIL	III, WIL				10	60	90,000,000
7	Audit Kinerja Lanjutan atas Peningkatan Ruang Terbuka Hijau										IV, WIL	IV, WIL	IV, WIL				10	40	60,000,000

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)					
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	Revisi Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 2023										I, II, III, IV, V, WIL							2	20		<p>1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengujian atas penyusunan subanses akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
2	Revisi Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023										I, II, III, IV, V, WIL							2	20		<p>1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengujian atas penyusunan subanses antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3	Revisi Perubahan RKPD Tahun 2022										I, II, III, IV, V, WIL							2	20		<p>1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengujian atas penyusunan subanses antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
4	Revisi Perubahan Renja 2022										I, II, III, IV, V, WIL							2	20		<p>1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengujian atas penyusunan subanses akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)	2022												SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD							I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL				Laporan Pertanggungjawaban atas hasil dari kegiatan/ program yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.	2	60	
2	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.				I, II, III, IV, V, WIL									Kelengkapan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.	2	40	
3	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.								I, II, III, IV, V, WIL					Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai Penjamin Kualitas tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah	2	40	
4	Penilaian Indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCP Tahun Anggaran 2022													1. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah 2. Pengadaan barang dan jasa 3. Pelayanan terpadu satu pintu 4. Aparat/pengawas intern 5. pemerintah 6. Manajemen aparatur sipil negara 7. Optimalisasi pajak daerah Manajemen aset daerah	1	20	

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)	2022												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022															Memastikan kelengkapan data pada SIHaraka	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD TA 2022	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta	20	20	
2	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)															1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan bagian dari asistensi pembangunan	Penyampaian LHKASN Tahun 2021 Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		5		
3	Pendampingan/Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta															PP No 60 Tahun 2008 dan Pergub 122 tahun 2020	Penerapan SPiprisasi oleh Perangkat Daerah!	Penilaian Risiko dan Penanganan Risiko Perangkat Daerah!			
4	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Pengujiannya Berencana Umum Pengadaan Ke dalam Aplikasi SIRUP															Mandatori dari Presiden melalui BPKP	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD setiap triwulan	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD	2	20	
5																Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Asst pada SKPD/UKPD lama yang mengalami pergantian Kepemimpinan (Kepala SKPD)	Pemisahan batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD (pejabat lama dengan pejabat baru)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
6	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI															Pergub Nomor 252 Tahun 2016 SOTK Inspektorat Pasal 3 ayat 2 huruf m ; TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan APIP oleh SKPD	TLHP BPK dan APIP yang belum ditindaklanjuti s.d Tahun 2022 oleh PD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2021 dan tahun sebelumnya (2004 - 2021) dan TLHP APIP oleh SKPD	Progress penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2021 dan tahun sebelumnya (2004 - 2021) dan TLHP APIP oleh SKPD	8	10	
7	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															Keputusan Inspektur No 4 Tahun 2021 tentang SOP Klinik Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah Konsultasi Pengawasan!	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
8	Pemantauan Pengaduan Masyarakat/Kasas dan c-dumas															Pengaduan masyarakat/Perintah Gubernur dan/atau Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah	Untuk menindaklanjuti Laporan/Pengaduan masyarakat dan/atau Petisi Inspektur/Permintaan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti terjadinya penyelenggaraan wewenang dan tindak pidana korupsi	Meyakinkan adanya penyimpangan atas Pengelolaan Barang dan Pembinaan dan pemeliharaan jasa/pengadaan barang/jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi/Perwakilan Daerah BOP/Pengelolaan dan subsidi/Diaplin pegawai	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2022**

**VI. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR**

NO AUDIT	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Audit atas Pengelolaan Aset dan Belanja Daerah pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur				JT										15	20	45,000,000	
2	Audit Kinerja Lanjutan atas Peningkatan Ruang Terbuka Hijau													IV, WIL		12	40	72,000,000
3	Post Audit Dana BTT di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	V, WIL	V, WIL												20	40	120,000,000	
4	Audit Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Tahun Anggaran 2021	V, WIL	V, WIL	V, WIL	V, WIL										20	40	120,000,000	
5	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022				V, WIL	V, WIL	V, WIL								20	60	180,000,000	
6	Audit Kepatuhan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022														10	60	90,000,000	
7	Audit Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)														10	60	90,000,000	





NO	AREA PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH/UNIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI	2022												Jumlah Personil	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD							I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							2	60	Laporan Pertanggungjawaban atas hasil dari kegiatan/ program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.	
2	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.																	2	40	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
3	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.																	2	40	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
4	Penilaian Indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCP Tahun Anggaran 2022													I, II, III, IV, V, VI				1	20	Ketercapaian waktu dan khandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang diformulasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  1. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah 2. Pengadaan barang dan jasa 3. Pelayanan terpadu satu pintu 4. Apresiasi pegawai intern pemerintah 5. Inspeksi aparaturn sipil negara 6. Optimalisasi pajak daerah 7. Manajemen aset daerah
5	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghitungan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP																	14	15	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD dan pengadaan barang/jasa setiap triwulan

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)	2022												SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022																Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan SKPD/UKPD	15	15		
2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP dan BPK-RI	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL				TLHP BPK dan APSP yang belum ditindaklanjuti s.d Tahun 2022 oleh PD mitra kerja Ibtan	7	20	Progress penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2021 dan tahun sebelumnya (2004 - 2021) dan TLHP APSP oleh SKPD		
3	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harita Kelengkapan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)																Perengkapan LHKASN Tahun 2021 melalui sistem SiHarita	3		Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
4	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghapusan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL				Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD setiap triwulan	2	20	Realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD		
5	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar																Tidak pidana penevelahan pungutan liar tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	40	75	Aparatur Sipil Negara dan masyarakat	
6	Pemantauan Pengaduan Masyarakat/Kasus dan e-dumas																Peringatan yang berindikasi penyimpangan atau pelanggaran wewenang dan/atau penyalahgunaan kekuasaan daerah	10	15	Meyakinkan adanya penyimpangan atas Daerah/Pengadaan Barang dan Jasa/Pembangunan dan pemeliharaan Jalan/Pengelolaan Perijinan/Pengelolaan dana BOS BOP/Pengelolaan bansos dan subsidi/Diupin pegawai	
7	Pamjab																Kepengawasan, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset pada SKPD yang mengalami pergantian lama dengan pejabat baru	10	15	Pemahaman batas dan tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD (pejabat lama dengan pejabat baru)	
8	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																Pelaksanaan penyelenggaraan Perangkat daerah tahun 2021			Sesuai kebutuhan daerah/unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Sesuai kebutuhan



NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JULAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
6	Audit Kepraktisan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe C dan D Tahun Anggaran 2022											V, WIL	V, WIL					12	60	108,000,000
7	Audit Kepraktisan atas Penatausahaan Dana BLUD di RSUD Tipe A dan B Tahun Anggaran 2022											V, WIL	V, WIL					17	60	153,000,000
8	Audit pengelolaan sampah pada Sudin Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1000	1000															8	40	48,000,000

NO REVIU	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT)	2022												JULAH HARI	ANGGARAN (Rp)				
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
1	Revisi Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 2023					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										2	20	<p>1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
2	Revisi Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										2	20	<p>1. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam Perubahan RKPD dengan informasi dalam Perubahan RPJMD;</p> <p>2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p>
3	Revisi Perubahan RKPD Tahun 2022					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										2	20	<p>1. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam Perubahan RKPD dengan informasi dalam Perubahan RPJMD;</p> <p>2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p>
4	Revisi Perubahan Renja 2022					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										2	20	<p>1. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam Perubahan RKPD dengan informasi dalam Perubahan RPJMD;</p> <p>2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p>
5	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2021					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										3	51	<p>1. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam Perubahan RKPD dengan informasi dalam Perubahan RPJMD;</p> <p>2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p>
6	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2022					I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL										3	20	<p>1. Melakukan pengujian atas: Kesesuaian informasi dalam Perubahan RKPD dengan informasi dalam Perubahan RPJMD;</p> <p>2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaedah perencanaan pembangunan.</p>

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI)	2022												JULAH PERSONIL	JUMLAH HARI	ANGGARAN (Rp)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghapusan Bencana Umum Pengadaan ke dalam DPA/lembaga SKRP dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah (SAKIP) SKPD	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	2	20		
2	Penelitian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.												2	60		
3	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa serta Penghapusan Bencana Umum Pengadaan ke dalam DPA/lembaga SKRP dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah (SAKIP) SKPD	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	2	40		
4	Penilaian Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.												2	40		
5	Penilaian Indikator dari Area Intervensi yang tercantum dalam MCP Tahun Anggaran 2022												1	20		

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT/KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)	2022												ANGGARAN (Rp)					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
1	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2021 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2022	1000													1000	17	20	Sesuai kebutuhan	
2	Pamjwb																		Sesuai kebutuhan
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat/kasus dan e-dumas														1000				Sesuai Kebutuhan
4	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		Sesuai kebutuhan
5	Pelaksanaan verifikasi Laporan Harita Kelembagaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)																		Sesuai kebutuhan
6	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar														1000				Sesuai kebutuhan
7	Rakorvas UPP Provinsi DKI Jakarta																		Sesuai kebutuhan
8	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF dan BPK-RI																		Sesuai kebutuhan
9	Pendampingan/Asistensi Penerapan Manajemen Risiko/SPF di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta																		Sesuai kebutuhan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
WILIS RASYID BASWEDAN